

**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur  
 Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018 - 2023  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel  
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan nilai penanaman modal  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

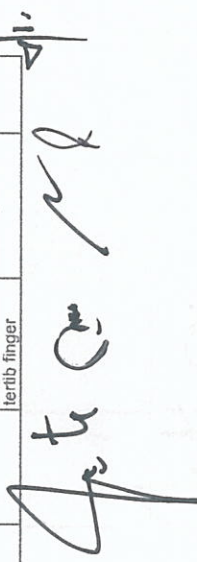
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Sebab <sup>1)</sup>			C/UC	Dampak <sup>2)</sup>		Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	SEKRETARIAT												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran, kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA)	ROO.SEK.01	Sekretaris	Adanya revisi renstra yang perlu dikordinasikan dengan bidang-bidang; Keterbalasan waktu dan stabilitas traffic dalam input SIPD.	Internal	C	Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam renstra tidak tepat waktu.	DTKPMPTSP	Konsultasi dengan Bappeda	- Mengusulkan konsinyering yang dilakukan oleh Bappeda; - Menjadwalkan untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait.	
			Keterlambatan dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LKJIP, Monev, LKPJ, LPPD, LKPD)	ROO.SEK.02	Sekretaris	Belum tersedianya data dari masing-masing bidang dan pihak eksternal	Internal & Eksternal	C & UC	Lamanya waktu untuk pengambilan keputusan; Pengurangan TPP.	DTKPMPTSP	Melakukan money internal dan pendampingan/ desk ke bidang	Melakukan back up data kinerja, monitoring dan evaluasi internal.	
			Ketidakeesuaian perencanaan kebutuhan dengan Pagu anggaran	ROO.SEK.03	Sekretaris	Pemberian plafon anggaran SKPD tidak sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan	Internal	C	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	DTKPMPTSP	Sudah membuat KAK, RKA, RKEMD, RAB.	Mengusulkan Perwal mendahului untuk kegiatan yang penting dan mendesak; Koordinasi dengan BKAD dan Bappeda.	

*[Handwritten Signature]*

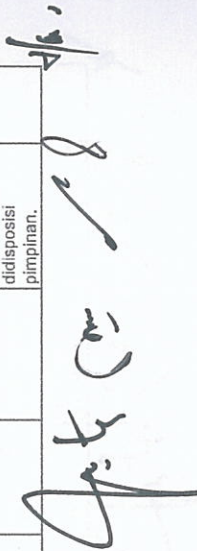
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Sebab <sup>1)</sup>		Sumber	CIUC	Dampak <sup>2)</sup>		Pihak yang Terkena	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
					Uraian	Uraian			Uraian	Uraian				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
			Ketidaksesuaian kode belanja.	ROO.SEK.04	Sekretaris	Kurang lelit pegawai pada saat kodefikasi dan input kode; Tidak tersedianya kode belanja dalam SIPD.	Internal & Eksternal	UC & C	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	DTKPMPPTSP	Verifikasi kodefikasi kegiatan ; Menyesuaikan dengan kode belanja yang ada dalam SIPD.	Verifikasi kodefikasi kegiatan dan indikator keluaran ; Reviu berjenjang ; Membuat usulan harga satuan baru dan PAK.		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	Pengajuan SPP-GU/LS belanja barang dan jasa terlambat	ROO.SEK.05	Sekretaris	Keterlambatan pengembalian dokumen pertanggungjawaban kegiatan oleh PPTK setelah diverifikasi oleh PPKKeu.	Internal	C	Keterlambatan pembayaran/pencairan GU/LS/TU	DTKPMPPTSP	Mengingatkan PPTK melalui jipri via WA / telepon	Mengontrol, mengawal dan memverifikasi dokumen surat pertanggungjawaban kegiatan dengan berkoordinasi antar staff keuangan; Membuat SOP pengajuan pencairan anggaran; Membuat money penyerapan anggaran.		
			Realisasi/serapan anggaran tidak mencapai target	ROO.SEK.06	Kepala Dinas	Adanya efisiensi anggaran ; Adanya sisa kontrak	Internal	C	Target Kinerja Anggaran tidak tercapai	DTKPMPPTSP	Evaluasi internal bidang/sektariaat Melakukan percepatan realisasi/serapan anggaran sesuai target dan waktu Membuat Laporan Money Kinerja Renja bulanan dan tribulan	Evaluasi internal bidang/sektariaat Melakukan percepatan realisasi/serapan anggaran sesuai target dan waktu Membuat Laporan Money Kinerja Renja bulanan dan tribulan		

*[Handwritten signature and initials]*

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab <sup>y</sup>		C/UC	Dampak <sup>xy</sup>		Pengaruh yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
						Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase BMD yang terinventarisir	Kejadian tertiban data barang milik daerah SKPD	ROO.SEK.07	KEPALA DINAS	Uraian	Internal	C	Uraian	DTKPMPTSP	Inventarisasi BMD, rekonsiliasi BMD secara berkala ; Mengikutsertakan pengurus barang untuk mengikuti bimtek/diklat.		n
			Kehilangan/kerusakan barang milik daerah SKPD	ROO.SEK.08	KEPALA DINAS	Uraian	Internal	C	Uraian	DTKPMPTSP	- Menyimpan bukti pemegang barang ; - Penjaga kantor, pemasangan teralis, brankas - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Melakukan inventarisasi secara berkala	- Menyediakan gudang inventaris barang ; - Menyimpan bukti pemegang barang ; - Penjaga kantor, pemasangan teralis, brankas - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Melakukan inventarisasi secara berkala	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pegawai yang terfasiliasi layanan masyarakat	Penyusunan laporan rekapitulasi absensi tidak akurat dan tidak tepat waktu	ROO.SEK.09	Sekretaris	Uraian	Internal	C	Uraian	DTKPMPTSP	- Melakukan perbaikan/pengadaan mesin finger print ; - Menyampaikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk tertib finger	- Melakukan perbaikan/pengadaan mesin finger print ; - Menyampaikan himbauan kepada seluruh pegawai untuk tertib finger	

  
 Date: 20/11/2018

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Sebab <sup>*)</sup>		C/UC	Dampak <sup>*)</sup>		Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
					Uraian	Pemilik		Uraian	Sumber		
a	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	Kebutuhan kantor tidak terfasilitasi	ROO.SEK.10	Sekretaris	Tidak disusun identifikasi kebutuhan rencana kegiatan	C	Kegiatan yang telah direncanakan tidak terfasilitasi secara optimal	DTKPMPTSP	Pengawasan pemakalan secara berkala; Koordinasi dengan bidang terkait usulan RKBMD; Menyusun identifikasi kebutuhan rencana kegiatan; Pemantauan pelaksanaan SOP RKBMD, RKPBM	n
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pengadaan BMD sesuai RKBMD	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	ROO.SEK.11	Sekretaris	Tidak disusun identifikasi kebutuhan kantor melalui RKBMD yang didasari oleh standar harga dan standar kebutuhan; - Keterlambatan input SIRUP	C	- barang hasil pengadaan over/under spek/volume - Keterlambatan proses pengadaan barang	DTKPMPTSP	Meningkatkan koordinasi dengan bidang-bidang terkait kebutuhan peralatan dan mesin lainnya - Menyusun identifikasi kebutuhan kantor dalam RKBMD - Melakukan input SIRUP tepat waktu - Memantau pelaksanaan SOP RKBMD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	Surat dinas tidak terkirim	ROO.SEK.12	Sekretaris	Pegawai yang menangani kurang cermat/lelit untuk memonitoring surat dinas; Disposisi surat tertambat.	C	Kegiatan tidak terlaksana/ tertambat	DTKPMPTSP	Mengirimkan melalui SURADI ; memonitoring surat dinas masuk / keluar; Membuat klasifikasi jenis map surat yang urgent untuk didisposisi pimpinan.	

  
 J. K. S.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Sebab <sup>1)</sup>			C/UC	Dampak <sup>2)</sup>		Pengaruh yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf									
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik		Uraian	Sumber				Uraian	Pihak yang Terkena							
a	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang terpelihara	Kerusakan barang milik daerah	ROO.SEK.13	KEPALA DINAS	Internal	Uraian	Umur ekonomis barang milik daerah telah habis; Tidak adanya gudang penyimpanan barang inventaris; Kesalahan dalam pemakaian BMD.	g	h	C	Uraian	Kegiatan tidak terlaksana/ terlambat/ terhambat	DTKPMPTSP	Uraian	- Inventarisasi BMD secara berkala; - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Menyediakan gudang inventaris barang; - Menganggarkan terkait pemeliharaan barang milik daerah - Membuat BAST dan rekap BAST antara pemegang barang dengan Kepala Dinas	Uraian	- Inventarisasi BMD secara berkala; - Asuransi BMD (kendaraan dinas/operasional) - Menyediakan gudang inventaris barang; - Menganggarkan terkait pemeliharaan barang milik daerah - Membuat BAST baru apabila ada pergantian pemegang barang	m	n
<b>BIDANG I (BIDANG TENAGA KERJA)</b>																				
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (1%)																		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pengangguran yang dilatih																		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tenaga Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	Peserta pelatihan tidak sesuai sasaran/kriteria	ROO.BID01.01	Bidang Seksi Pelatihan dan Produktivitas Naker	Eksternal	Uraian	Man Peserta yang berasal pokok Material Machine Money Method tidak ada SOP screening peserta pelatihan	g	h	UC	Uraian	Tujuan pelatihan terkait menciptakan lapangan / memberikan kesempatan kerja tidak tercapai	Dinas Bidang Masyarakat	Uraian	Unjuk DBHCT ada aplikasi untuk mendaftarkan Unjuk DBHCT hasil musren ada aplikasi supaya tidak terulang peserta nya itu-	Uraian	Menerapkan SOP		

*Handwritten signature and initials:*  
Gita  
D

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab*)			C/UC	Dampak**)		Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
						Uraian	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		Persentase peserta pelatihan keterampilan kerja (70%)	Peserta pelatihan tidak memenuhi kompetensi	ROO.BID01.02	Bidang Seksi Pelatihan dan Produktivitas Naker	Man Saat ujian kompetensi sakit, gangguan konsentrasi Material Machine Money Method	Eksternal	UC	Tujuan pelatihan terkait menciptakan lapangan / memberikan kesempatan kerja tidak tercapai	Dinas Bidang Masyarakat	Ujian ulang untuk kegiatan yang 2 gelombang Untuk barista bisa dilakukan ujian dari pihak LPK yang bersangkutan		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan											
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang mengikuti bimtek	Tidak seluruh LPK yang terdaftar di kota Malang mengikuti kegiatan bimtek	ROO.BID01.03	Bidang Seksi Pelatihan dan Produktivitas Naker	Man Material Machine Money Kurangnya anggaran Method	Eksternal	UC	Ada LPK yang melanggar peraturan normatif terkait kewenangan selaku lembaga pelatihan	Dinas Bidang LPK Masyarakat			
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak											
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)											



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak*)		Pengaruh yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
						Uraian	Uraian		Sumber	Pihak yang Terkena			
a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdam pak pada kepentingan di 1 (satu) daerah/ Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	Peserta bimtek tidak sesuai sasaran	ROO.BID01.04	Bidang Naker Seksi HI	Man Peserta yang dikirim tidak sesuai kriteria/sasaran undangan Material Machine Money Method	Esternal	UC	Tujuan bimtek terkait penyusunan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama tsak tercapai	Dinas Perusahaan Tenaga Kerja	Pengesahan PP melalui dinas	1. Membuat kolom jabatan dan nomor telepon pada daftar hadir bimtek 2. Data terkait Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB yang dimiliki Bidang Naker harus diolah lebih lanjut untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan bimtek	n
		Kegiatan yang dilaksanakan Meeting hallday sosialisasi PP dan PKB	Narsum kurang bisa menyampaikan materi dengan baik	ROO.BID01.05	Bidang Naker Seksi HI	Man Material Machine Money Method Pemilihan narsum harusnya melalui seleksi berdasarkan latar belakang kompetensi sekaligus kemampuan publik speaking	Internal	C	Tujuan bimtek terkait penyusunan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama tsak tercapai	Dinas Perusahaan Tenaga Kerja		1. Dalam surat permintaan ditambahkan kualifikasi terkait publik speaking 2. Pemilihan narsum berdasarkan referensi	
			Sasaran utama/ Perusahaan yang tidak mempunyai PP tidak menghadiri undangan	ROO.BID01.06	Bidang Naker Seksi HI	Man keterbatasan waktu dan jumlah tenaga kerja, kurangnya kesadaran pihak perusahaan Material Machine Money Method	Eksternal	UC	Tujuan bimtek terkait penyusunan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama tsak tercapai	Dinas Perusahaan Tenaga Kerja		Pendataan Perusahaan di Kota Malang secara rill beserta data terkait	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Demo mayday tetap terjadi (di sby)	ROO.BID01.07	Bidang Naker Masyarakat Kota Sby	Man Undangan menolak hadir Material Machine Money Method	Eksternal	UC	Tujuan sarasehan yaitu menekan aksi demo hari buruh tidak tercapai	Masyarakat Pemkot			

*J. K. C.*

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Rencana Tindak Pengendalian	Paraf	
						Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			Pengendalian yang Ada
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		Kegiatan yang dilaksanakan Jasa penyelenggaraan Event (Peningkatan Kapasitas Tim LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan) Meeting holiday Mayday dan UMK	Peserta sosialisasi UMK tidak sesuai sasaran	ROO.BID01.08	Bidang Naker Seksi HI	Man Peserta yang dikirim tidak sesuai kriteria/sasaran undangan Material Machine Money Method	Eksternal	UC	Tujuan sosialisasi UMK 'tidak tercapai	Dinas Perusahaan Tenaga Kerja	Membuat kolom jabatan dan nomor telepon pada daftar hadir bimtek		
			Perselisihan Perusahaan dgn pekerja terkait UMK	ROO.BID01.09	Bidang Naker Seksi HI	Man Kesadaran akan hak makin tinggi Material Machine Money Keterbatasan keuangan perusahaan Method	Eksternal	UC	Hubungan Industrial tidak kondusif	Dinas Perusahaan Tenaga Kerja	Sosialisasi UMK ada sanksi secara perundangan pengawas dari provinsi	Sosialisasi UMK melalui media lain agar pekerja mengetahui terkait UMK	
			Peserta peningkatan kapasitas tidak semua bisa ikut	ROO.BID01.10	Bidang Naker Seksi HI	Man Usia, Kesehatan, dan ketidakseediaan peserta untuk diganti Material Machine Money Method	Eksternal	UC	Tidak semua kandidat peserta mendapatkan pemahaman yang sama	Dinas Tim	Penggantian peserta yang berhalangan		
<b>BIDANG 2 (BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL)</b>													
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL													
		Kegiatan: Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota											

*Handwritten signature and initials*



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
						Uraian	Sumber		Uraian yang Ada	Pihak yang Terkena		
a	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal (pameran, duta investasi, forum bisnis, match making, pembuatan company profile) tidak tepat waktu.	ROO.BID02.01	KABID PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL ; KASUB-SUBSTANSI PROMOSI DAN KEMITRAAN PENANAMAN MODAL	Kesiapan pihak eksternal (vendor dan perangkat daerah lain) yang terlibat; Kesulitan menjaring peserta duta investasi; Penentuan kriteria peserta penerima penghargaan forum bisnis.	Eksternal & Internal	UC & C	Kegiatan pameran dan pemilihan duta investasi tidak terlaksana atau tertunda; Tidak ada investor yang berinvestasi; Tidak tercapainya target kinerja.	Penjaringan peserta duta investasi melalui daring dan luring; Koordinasi ke vendor pelaksana pameran; Menetapkan kriteria lebih rinci per sektor atas peserta Forum Bisnis.	n	
<b>BIDANG 3 (BIDANG PENGENDALIAN, PENGADUAN, DATA DAN INFORMASI)</b>												
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal											
	KEGIATAN: Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kurang akurat	ROO.BID3.01	Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Disnaker PMPTSP Kota Malang	Fitur pada sistem (IZOL) perlu perbaikan	internal	C	Data yang kurang akurat pada perencanaan dan evaluasi	Pada saat sistem mengalami kendala dilakukan koordinasi dengan pengembangan aplikasi	Merencanakan dan berkoordinasi dengan pihak pengembangan untuk melakukan perbaikan fitur pada IZOL (ftur laporan izin masuk perlu diubah menjadi laporan permohonan masuk serta mengintegrasikan peta dari kominfo dengan izol)	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal											
	KEGIATAN:											



No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab <sup>1)</sup>		CIUC	Dampak <sup>2)</sup>		Pihak yang Terkena	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
						Uraian	Uraian		Sumber	Uraian				
a	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Kurangnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	ROO.BID3.02	Kepala Dinas	1. Data profil pelaku usaha banyak yang tidak diupdate oleh pelaku usaha, berupa status aktif dan tidak aktif serta lokasi yang tidak sama dengan yang diinput di dalam OSS 2. Kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan Investor dalam melaporkan LKPM 3. Kurangnya SDM seksi pengendalian dan pelaporan	Eksternal - Internal	UC-C	1. Kinerja tim pengawasan kurang efektif akibat data profil yang tidak update 2. Kondisi realisasi penanaman modal kurang terpantau dengan optimal 3. Tugas dan fungsi bidang pengendalian, pengaduan, data dan informasi DPMPPTSP terganggu	1. Dilakukan cek lokasi (survei lapangan) 2. Disnaker PMPTSP Kota Malang menyampaikan ke pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM 2. Dilakukan sosialisasi terkait LKPM kepada Pelaku Usaha 3. Program LKPM award untuk memberikan apresiasi kepada Pelaku Usaha yang patuh menyampaikan LKPM 4. Surat	1. Pemanggilan kepada Pelaku Usaha yang tidak tertib menyampaikan LKPM 2. Memberikan surat peringatan kepada Pelaku Usaha yang tidak tertib. 3. Mengusulkan dan melakukan pembekuan atau pencabutan izin kepada pelaku usaha yang tidak tertib LKPM 3x berturut-turut	n		
<b>BIDANG 4 (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN EKONOMI, PARIWISATA, DAN SOSIAL BUDAYA)</b>														
	Program Pelayanan Penanaman Modal													
	Pelayanan perizinan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan ekonomi, pariwisata, sosial budaya sesuai standar												

Arite Sir M S

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Sebab <sup>1)</sup>			C/UC	Dampak <sup>2)</sup>		Rencana Tindak Pengendalian	Paraf	
					Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			Pengendalian yang Ada
a	Penyediaan pelayanan perizinan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Keterlambatan pemrosesan penerbitan pengajuan perizinan dari Pelaku usaha	ROO.BID4.01	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	1. Dinas teknis terkait belum menyampaikan perubahan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rekomendasi perizinan; 2. jaringan internet lambat/sadang dilakukan pemeliharaan sistem informasi sehingga tidak dapat menginput data pada sistem OSS/SHZOL; 3. pelaku usaha belum memahami tata cara input data/ pemenuhan persyaratan dasar perizinan pada sistem OSS RBA 4. Pelaku usaha belum melakukan migrasi dari sistem OSS versi lama ke versi baru OSS RBA 5. Pelaku usaha kurang memahami penggunaan sistem OSS	external	UC	Keluhan Pelaku usaha atas sulitnya penggunaan sistem OSS	1. Pemerintah Kota Malang 2. Disnaker PMPTSP 3. Pelaku Usaha	1. Pendampingan OSS 2. Pemenuhan SDM yang kurang dengan perekrutan tenaga pendukung operasional kegiatan		
			Komplain dari pelaku usaha atas keterlambatan proses layanan perizinan dan non perizinan	ROO.BID4.02	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	1. kurang optimalnya Perangkat daerah teknis terkait dalam menindaklanjuti perubahan regulasi dari pusat; 2. jaringan internet lambat/tidak dapat menginput data pada sistem OSS/SHZOL	eksternal	UC	Maraknya tempat usaha belum berizin	1. Pemerintah Kota 2. Disnaker PMPTSP 3. pelaku usaha 4. masyarakat	1. Berkoordinasi dengan dinas teknis terkait 2. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha	menyusun dan mengupdate SOP perizinan dan non perizinan lintas dinas teknis terkait	
<b>BIDANG 5 (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEKERJAAN UMUM)</b>													
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan PU sesuai standar											

  
 J. S. C.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab <sup>*)</sup>		C/UC	Dampak <sup>*)</sup>		Pihak yang Terkena	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Paraf
						Uraian	Sumber		Uraian	Uraian				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Keterlambatan penerbitan ijin	ROO.BID5.01	Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Non Perizinan Pekerjaan Umum	1. Kekurangan berkas pada proses verifikasi (gambar dan survai lokasi) 2. Kekurangan personal 3. Kompetensi petugas loket yang berbeda sehingga penyampaian kepada pemohon tidak sesuai	Internal dan Eksternal	C	1. Keluhan dari pemohon 2. Kerja lembur	1. Masyarakat 2. Disnakerpmpptsp	Mempercepat proses dengan lembur	1. Meningkatkan kompetensi 2. Penempatan sesuai dengan kompetensi (khususnya untuk TPOK)		
			Ketidaktepatan pemberian lokasi izin untuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ROO.BID5.02	Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Non Perizinan Pekerjaan Umum	1. Belum ada Perwal RDTR 2. Perda RTRW tidak detail	Eksternal	C	Keluhan dari masyarakat Pelaksanaan tata ruang kota tidak sesuai dengan perencanaan	1. Masyarakat 2. Disnakerpmpptsp	Rapat dengan FPR (Forum Penataan Ruang)	Menyusun mekanisme verifikasi atas semua pengajuan KKPR		
			Komplain warga atas penerbitan ijin PBG	ROO.BID5.03	Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Non Perizinan Pekerjaan Umum	Verifikator kurang optimal	Eksternal	C	Keluhan dari masyarakat	1. Masyarakat 2. Disnakerpmpptsp	Koordinasi dengan dinas teknis	Koordinasi dengan dinas teknis		

Mervein D.  
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRI SASITYAWAN S.STP., M.Si  
Pembina Tk. I  
19790709 199810 1 001